

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

¹Reza Nadien Nuranto,² Irmanjaya Thaher
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Kampus Bekasi
Jl. Harapan Indah Boulevard No.2, RT.10/RW.8, Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kota
Bekasi, Jawa Barat 17214
Email: [1rezanadiennuranto@gmail.com](mailto:rezanadiennuranto@gmail.com)
[2Irman.jaya@esaunggul.ac.id](mailto:Irman.jaya@esaunggul.ac.id)

Abstrak

Penyebaran pandemi COVID-19 semakin meluas dan memicu krisis nasional dan global. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan bagian dari tanggap darurat Kesehatan Masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji Disharmonisasi dan tidak sejalannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Dalam skripsi ini menjawab permasalahan terkait 1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan? 2. Bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kajian pustaka dan Analisis isi (*content analysis*), Hasil dari Analisa Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dikarenakan substansi yang ada di dalam Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar hanya bersifat menghimbau tidak bersifat mengatur dan terjadinya perbedaan materi muatan dan juga akibat dari tidak sejalannya yaitu bisa merugikan perekonomian negara dan juga rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi rendah. Serta mengakibatkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Besekala Besar tidak diterapkan dengan baik di beberapa daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pandemi COVID-19, Karantina Kesehatan

Abstract

The spread of the COVID-19 pandemic has intensified, triggering a national and global crisis. The Indonesian government has imposed a no. 21 - year 2020 government regulation on large-scale social restrictions for expediting the treatment of coronavirus disease (COVID-19) as part of public health emergency response. The study will review disharmony and in contrast with 2020 government regulation no. 21 on large-scale social restrictions in terms of accelerated treatment of the corona virus disease 2019 (COVID-19), according to the 2018 rule on quarantine of health. This thesis answered the problem of 1. How does the 2019

government regulation no. 21 in 2020 apply social restrictions on scaling up the treatment of the corona virus disease 2019 (COVID-19) under the 2018 rule on health quarantine? 2. How effective is the 2019 state regulation of 2020's no. 21 government regulation on large-scale social restrictions for expediting the corona virus disease 2019 (COVID-19) under the 2018 rule on health quarantine? Research methods used in this study are normative research methods using a by-law approach, literature review and content analysis. The results of a 2020 governmental regulatory policy analysis on social restrictions are not consistent with the 2018 rule on health quarantine, Fuel by the decentralized substance in number 21 in 2020 on social toll, it is only an unregulated and disproportionate difference in content, and the result of unemployment could be detrimental to the economy and public confidence in government. And with the 2020 government's number 21 rule on major global social restrictions, not being well implemented in some areas.

Keywords: policy, large-scale social restrictions, COVID-19 pandemic, health quarantine